



Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Era Merdeka Belajar

E. Mulyasa* dan Wiwik Dyah Aryani**

Mulyasa2000@gmail.com

*Universitas Langlangbuana

**Universitas Islam Nusantara

Received: 06 January 2022; Revised: 14 March 2022; Accepted: 28 April 2022
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.2.933-944.2022>

ABSTRAK: Sistem Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan masalah penting yang sedang hangat dibicarakan, bahkan menjadi agenda utama dalam akreditasi, sehingga perlu dikelola secara profesional. Penelitian ini bertujuan menemukan dan mendeskripsikan implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung, yang berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PEPP) telah menghasilkan perbaikan secara berkesinambungan. Hal tersebut ditemukan dalam laporan tahunan tentang evaluasi diri yang dijadikan dasar dalam pengembangan rencana strategis, rencana operasional, rencana induk pengembangan, rencana anggaran dan rencana kerja tahunan; namun belum merupakan kesatuan yang utuh. Oleh karena itu direkomendasikan kepada berbagai pihak antara lain bagi Perguruan Tinggi Swasta, agar menggunakan pendekatan sistem sebagai landasan berpikir, cara mengelola, dan cara menganalisis kehidupan lembaga secara utuh.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Merdeka Belajar

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki fungsi yang sangat stratejik dalam peradaban dan kebudayaan manusia, yaitu sebagai pusat kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan merupakan kekuatan moral masyarakat. Pendidikan tinggi menjadi daya gerak (*driving force*) yang dinamis dalam proses modernisasi, serta menghubungkan keadaan sekarang dengan masa depan, dan mengusahakan penemuan arah modernisasi menuju pembangunan masyarakat masa depan. Kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pendidikan tinggi dikelola dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dituntut untuk memanifestasikan akuntabilitas publik, memiliki tanggung jawab sosial, dan menjaga serta senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan bidang kajiannya.

Secara filosofis, keberadaan pendidikan tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta) bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM; sebagaimana



tujuan pendidikan secara makro yang dikemukakan oleh Wahono (2016) adalah sebagai berikut.

Pendidikan sebagai pembentukan watak, alat pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat pembentukan kesadaran bangsa, alat mengangkat status sosial dan alat menguasai teknologi serta memberikan warna bagi peningkatan iman dan takwa (imtak) dalam upaya mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini. Keseimbangan antara imtak dengan iptek diharapkan dapat menghasilkan cendekiawan yang memiliki rasa tanggung jawab dunia dan akhirat.

Penjaminan mutu perguruan tinggi di era merdeka belajar merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin ditawar lagi. Pendidikan tidak hanya berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menghasilkan ilmuwan dan cendekiawan yang memiliki keimanan, ketaqwaan, dan kepribadian. Oleh karena itu, penyelenggara perguruan tinggi perlu merumuskan secara cermat visi, misi, statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategi, agar bisa menjaga dan meningkatkan mutu lulusannya. Relevansi lulusan dan mutu pendidikan adalah persoalan kebutuhan masa kini dan masa mendatang, dan selayaknya dipandang sebagai masalah nasional. Sehubungan dengan sistem pendidikan, Umaedi (2015:2) mengungkapkan bahwa,

Sistem pendidikan Indonesia ini cenderung terlihat lebih berorientasi dan terfokus pada pendidikan dan prosesnya. Input pendidikan seperti sarana prasarana, dan kurikulumnya beserta prosesnya, memang sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar, tetapi hal ini tidak saja cukup. Karena itu untuk memperbaiki keadaan di atas, sistem pendidikan di Indonesia sekarang sudah harus mulai difokuskan pada pengendalian kualitas mutu lulusannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buchori (2012) menunjukkan bahwa manajemen perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan lingkungan yang berubah cepat sehingga membutuhkan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kinerja organisasi yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Mulyasa (2016; 2017), bahwa: tuntutan bagi perguruan tinggi untuk memiliki organisasi yang sehat merupakan salah satu poin strategis dalam HELTS (*Higher Education Long Terms Strategy*) 2003–2010, sehingga “*a continuous quality improvement should become its primary concern.*” Hanya organisasi atau satuan pendidikan yang sehatlah yang dapat memberikan pelayanan yang baik bagi terjadinya “*a continuous quality improvement*”.

Mutu pendidikan tinggi dapat ditentukan oleh status akreditasi, serta dapat ditentukan melalui sistem penjaminan mutu internal (*internal quality assurance system*) yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan modal utamanya adalah keinginan dan komitmen untuk melaksanakannya. Dalam upaya melaksanakan kegiatan inilah perlu adanya sistem yang baik agar penjaminan mutu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sistem ini harus berdasarkan pada pemikiran yang benar akan konsep dan teori penjaminan mutu itu sendiri, sehingga segala bentuk pijakan akan mengarah pada mindset yang benar berdasarkan kajian akademik yang tepat.



Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi diperlukan usaha menjamin mutu tersebut secara berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas serta memiliki nilai tambah (*added values*) bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perguruan tinggi yang hanya mengandalkan dana dari masyarakat akan terkendala ketika dihadapkan pada minimnya jumlah mahasiswa yang berdampak kepada pendanaan dan fasilitas perkuliahan. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Era Merdeka Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung perlu diteliti secara seksama dan cermat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Penjaminan Mutu

Penelitian ini berangkat dari teori sistem penjaminan mutu yang dikemukakan oleh beberapa pakar di bidang manajemen dalam lingkup pendidikan. Berdasarkan definisi mutu yang digagas oleh Sallis (2002), maka teori mutu yang dijadikan pijakan utama dalam penelitian ini ialah teori *The Four Quality Imperatives* berkenaan dengan refleksi lingkungan yang kompleks ketika suatu lembaga pendidikan tinggi beroperasi. Teori tersebut berfokus pada perspektif nilai yang menjadi kekuatan pendukung serta motivasi dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa persyaratan mutu mencakup: 1) *Moral Imperative* (Persyaratan Moral); 2) *Professional Imperative* (Persyaratan Profesional); 3) *Competitive Imperative* (Persyaratan Kompetitif); dan 4) *Accountability Imperative* (Persyaratan Akuntabilitas) (Sallis, 2002: 3-5).

Orang tua, masyarakat, dan peserta didik layak memperoleh mutu terbaik dari pelayanan pendidikan (Mulyasa, 2021). Hal ini merupakan landasan moral tertinggi pendidikan, dan hanya sedikit dari berbagai diskusi bidang pendidikan yang menyatakan bahwa itu bukanlah bagian dari pelayan jasa pendidikan. Hal tersebut merupakan tugas dari para pengelola jasa pendidikan agar memiliki kepedulian dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Mutu Internal

Mutu internal erat kaitannya dengan evaluasi diri. Stufflebeam (2005: 69) mengemukakan bahwa evaluasi diri adalah: “*the process for determining the degree to which these changes in behavior are actually taking place.*”; yang berarti bahwa evaluasi adalah proses menentukan derajat perubahan tingkah laku yang terjadi. Dalam implementasi SPMI, evaluasi diri merupakan evaluasi internal untuk mengetahui dan menentukan mutu internal lembaga pendidikan tinggi, sebagai langkah pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi diri dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan data lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan lembaga pendidikan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal lembaga pendidikan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Spencer (2014) mengatakan bahwa evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh institusinya sendiri, untuk mengumpulkan data, analisis data, dan interpretasi hasil yang digunakan untuk perencanaan, pengembangan, perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga. Ditinjau dari waktunya, evaluasi dapat dilakukan seiring dengan tahapan program yang akan dievaluasi, yaitu:



(1) pada tahap awal untuk perencanaan dilakukan dengan *input evaluation*, *SWOT Analysis*, atau *Needs Assessment*; (2) pada tahap pelaksanaan program dilakukan evaluasi proses atau *formative evaluation*; (3) pada tahap hasil dilakukan evaluasi hasil atau *summative evaluation*; (4) dan dampak kebijakan dievaluasi dengan evaluasi dampak, evaluasi tindak lanjut atau *follow-up evaluation*.

Pelaksanaan Evaluasi Diri, menurut Karpagam and Suganthy (2016), mengacu pada empat prinsip implementasi yaitu: berorientasi pada tujuan, mengacu pada kriteria keberhasilan, asas manfaat, dan objektif.

Berdasarkan teori uraian di atas, evaluasi diri perguruan tinggi merupakan tahapan dari SPMI sebagai refleksi diri untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang mutu internal terhadap apa yang sudah dikerjakan dan dimiliki dalam meraih program yang dicanangkan dan untuk memenuhi tujuan pengembangan lembaga sehingga terungkap kelemahan dan kelebihan. Evaluasi diri harus digunakan untuk mengetahui, memahami, dan menyadari dengan baik profil suatu lembaga, termasuk mutu, dan kondisi lembaga saat ini sebagai landasan penentuan kondisi masa depan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumenter, dan observasi. Teknik wawancara lebih efektif dari kuesioner tertulis karena peneliti sendiri menjadi instrumen penelitian (Sharan B. and Mirriam, 2017). Peneliti sebagai instrumen penelitian mampu menangkap dan mengevaluasi makna dari interaksi diferensial yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkuantifikasi hasil jawaban dengan angka, tetapi menggunakan kata-kata. Penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di era merdeka belajar merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). SPMI di era merdeka belajar merupakan kegiatan mandiri perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga kegiatannya dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan pemerintah. SPMI dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di era merdeka belajar mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*kaizen*); sesuai dengan tuntutan Undang Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 52 menyatakan sebagai berikut: ayat (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.



Implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi tentang perguruan tinggi secara akurat, lengkap, dan mutakhir. Data dan informasi tersebut dikelola oleh suatu pangkalan data pada masing-masing perguruan tinggi. Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal oleh masing-masing perguruan tinggi merupakan bahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu eksternal atau akreditasi oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya yang diakui pemerintah.

Kebijakan Mutu Pendidikan Tinggi

Kebijakan mutu (*quality policy*) merupakan ketetapan secara menyeluruh suatu perguruan tinggi mengenai mutu penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan secara formal dan resmi oleh pimpinan institusi. Kebijakan mutu merupakan pernyataan resmi dari manajemen puncak berkenaan dengan arah dan tujuan kinerja mutu (*quality performance*) yang hendak dicapai; sebagai landasan atau acuan dalam perumusan sasaran mutu dan pengembangan dokumen mutu lainnya; serta menjadi landasan atau acuan bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan kehidupan berorganisasi. Kebijakan mutu yang menjadi landasan dalam implementasi SPMI di era merdeka belajar pada prinsipnya mengacu pada visi institusi, yang merupakan manifestasi dari tiga pilar Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, bisa dimaknai bahwa sebagai komunitas akademik yang berdasarkan iman (kepercayaan), dipandang perlu untuk senantiasa berikhtiar mencari dan menyebarluaskan kebenaran melalui penelitian dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan martabat manusia melalui pengembangan keunggulan lokal untuk dapat berkiprah pada tataran internasional. Dalam rangka mengembangkan potensi lokal agar bisa menjadi unggulan pada tataran internasional demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan, maka institusi diarahkan untuk menjadi *research-based university* dalam proses pembelajaran, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat, yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi dasar untuk meningkatkan mutu dalam materi dan proses pembelajaran.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai kebijakan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa metoda pendidikan yang dilaksanakan senantiasa secara bertahap berubah menuju ke proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered education*), sehingga mahasiswa memiliki sikap proaktif dan berbagai karya di dalam proses pembelajarannya. Selain hal tersebut, pihak institusi juga berupaya menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi informasi untuk menciptakan mahasiswa yang mandiri dan inovatif.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai kebijakan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa sistem pendidikan hanya dapat dikatakan berhasil bila proses pendidikan tersebut memberikan value dan keunggulan kompetitif pada lulusannya yang sekaligus merupakan value dan keunggulan kompetitif dari institusi pendidikan. Sistem pendidikan memerlukan keterlibatan aktif konsumen dalam proses penciptaan nilai (*value creation*).



Hal ini sesuai dengan karakteristik sistem ekonomi pasar, profil lulusan institusi pendidikan tinggi haruslah merepresentasikan kompetensi yang kompetitif dan adaptif (*Adaptive & Competitive Competency-ACC*). Kompetensi tersebut dibangun melalui pembentukan nilai kompetensi generik (pendukung) dalam penguasaan bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kompetensi khusus (utama).

Berkaitan dengan implementasi SPMI di era merdeka belajar isu sentral proses pembelajaran atau value creation dalam sistem pendidikan adalah pembentukan kompetensi mahasiswa sebagai manifestasi dari penguasaan empat pilar pendidikan, “*learning to know, to do, to live together and life long learning*”, sejalan dengan pergeseran tata nilai universal abad 21 yang berubah dari konsep pertumbuhan ekonomi ke arah pengembangan kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, keterampilan profesional (*hardskills*) dan keterampilan personal (*softskills*) tidak lagi dipandang secara terpisah, tetapi merupakan kesatuan utuh dalam pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan sektor lapangan kerja yang sedang dan sudah menuju *ICT based management system* dan globalisasi dengan segala aspeknya dipastikan akan menjadi faktor penggerak ke arah tuntutan penguasaan teknologi dalam berbagai bidang profesi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai kebijakan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, bisa dimaknai bahwa dalam upaya menjadi komunitas akademik peringkat internasional, maka salah satu prasyarat untuk berkualitas global adalah terselenggaranya *good university governance* dan peningkatan akses institusi oleh para *stakeholder* di manapun tempatnya. Maka misi strategis yang dipandang mendukung tercapainya prasyarat tersebut ialah sebagai berikut, [1] mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan standar prosedur operasional dengan dukungan sistem informasi; [2] meningkatkan akses terhadap informasi kehidupan kampus dan informasi akademik; [3] mendorong terselenggaranya registrasi satu pintu melalui sistem *e-payment* yang diiringi dengan transparansi informasi penerimaan dana dari mahasiswa; [4] mendukung tersedianya informasi untuk kepentingan penjaminan mutu; serta [5] mendukung peningkatan kualitas pembelajaran melalui dimanfaatkannya *e-learning support*.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai kebijakan mutu dari narasumber yang berasal dari pihak Kopertis IV Wilayah Jawa Barat dan Banten, maka bisa dimaknai bahwa kebijakan mutu yang ditetapkan dalam sebuah institusi pendidikan tinggi swasta mencerminkan kesungguhan dan kepedulian pengelola PTS dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun luaran program akademik, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi yang dikelolanya.

Kebijakan tertulis baik di tingkat sistem maupun perguruan tinggi tentang pentingnya penyelenggaraan penjaminan mutu, tampaknya diperlukan bagi dasar penyempurnaan praktek penjaminan mutu yang ada saat ini. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya universitas untuk mengembangkan mekanisme penjaminan mutu lebih lanjut mengingat besarnya peranan penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu baik mutu pendidikan maupun mutu universitas secara keseluruhan. Lebih lanjut, kebijakan tertulis tentang penjaminan mutu juga dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan peran Itjen dalam rangka menjamin pencapaian mutu dari suatu universitas.



Konteks yang lain bagi pentingnya kebijakan tertulis tentang penjaminan mutu adalah bahwa mekanisme atau sistem penjaminan mutu dari suatu universitas dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi dalam hal operasionalisasi perguruan tinggi. Dalam pengembangan kebijakan tertulis tentang penjaminan mutu di universitas, hendaknya diidentifikasi secara rinci mengenai siapa harus melakukan praktek-praktek penjaminan mutu. Apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh fakultas atau unit-unit administrasi tertentu atau dibentuk komite khusus, seperti *academic board*, *education committee*, *quality assurance committee*, *committee of associate deans*, *postgraduate* dan *scholarship committee*.

Selanjutnya, praktek-praktek apa saja yang dapat dikembangkan oleh suatu universitas sehubungan dengan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan penjaminan mutu. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas lainnya juga perlu diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan mutu. Terakhir, kepada siapa kegiatan-kegiatan penjaminan mutu tersebut dipertanggungjawabkan merupakan pertimbangan yang penting untuk menghindari adanya kenyataan tidak adanya tindak lanjut setelah penjaminan mutu dilaksanakan. *Return on quality* juga perlu diperhatikan mengingat adalah tidak bijaksana jika usaha-usaha penjaminan mutu ternyata tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh.

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di era merdeka belajar. SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan, serta proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan dijanjikan, sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan *stakeholders* (aspek induktif), yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses sistematis yang menjamin pencapaian mutu.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai program penjaminan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa perumusan berbagai program penjaminan mutu yang dilakukan harus memperhatikan arah dan kebijakan institusi yang diwujudkan dalam rencana strategis dan rencana operasional. Dengan demikian, tujuan penjaminan mutu internal adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, serta dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas



penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai program penjaminan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa program kerja dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar perlu mengantisipasi isu yang meliputi: (1) peningkatan daya saing; (2) kepemimpinan dan tata kelola yang baik; (3) optimalisasi fungsi sistem; dan (4) pencapaian standar global. Sasaran dari program sistem penjaminan mutu internal di era merdeka mencakup bidang Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat), sumberdaya manusia, dan sistem manajemen. Program penjaminan mutu disusun berdasarkan urutan prioritas dalam suatu siklus penetapan standar, pemenuhan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar didasarkan pada konteks berkelanjutan dan terus menerus mengadopsi model *Kaizen* yang menerapkan PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang didahului dengan menetapkan standar yang menjadi acuan (*benchmarking*) tingkat universitas, fakultas, jurusan maupun program studi. Dengan penetapan *benchmarking* ini maka implementasi penjaminan mutu ditetapkan dengan suatu siklus kegiatan penjaminan mutu yaitu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, audit internal, rumusan koreksi, peningkatan mutu dan penetapan standar baru.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai program penjaminan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa rencana induk institusi dalam peningkatan mutu, efisiensi institusi dan kepuasan konsumen (mahasiswa) diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi institusi dan memberikan kompetensi yang kompetitif dan adaptif bagi para lulusan, baik yang memasuki dunia profesi *entrepreneur (employment creation)* ataupun *private enterprise (employability)*. Untuk dapat mencapai hasil tersebut penciptaan sistem manajemen dan sistem pembelajaran yang kompetitif merupakan prasyarat yang menjadi keharusan. Di dalam rencana pengembangan institusi menunjukkan komitmen yayasan dan universitas untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Keterbatasan perguruan tinggi swasta yang berkembang secara mandiri tidak harus menjadi batasan yang menjadi penghambat misi institusi untuk mencerdaskan bangsa dan menyiapkan generasi muda bangsa menghadapi era merdeka belajar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai program penjaminan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa program penjaminan mutu di era merdeka belajar mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek non akademik lainnya.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai kebijakan mutu dari narasumber yang berasal dari pihak Kopertis IV Wilayah Jawa Barat dan Banten, maka bisa dimaknai bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan



menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai program penjaminan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa proses penjaminan mutu harus dilaksanakan dengan asumsi mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan melainkan menjadi tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Dalam melakukan tindakan yang benar pada tahapan pertama berarti mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian, menunda pekerjaan dapat berakibat fatal bagi seluruh proses manajemen. Oleh karenanya pencegahan lebih baik dibanding dengan menanggulangi dan memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini, keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi, yaitu komunikasi dan tim kerja yang kompak. Dengan berkomunikasi dan bekerjasama semua orang mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, bagaimana mengerjakan, kapan waktu yang tepat, dimana dan dengan siapa setiap orang harus berhubungan.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai program penjaminan mutu dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa MBKM telah mengubah hampir semua kegiatan yang selama ini dilakukan di perguruan tinggi, termasuk kegiatan pembelajaran. MBKM telah membuka peluang baru sehingga memungkinkan pendidikan tinggi beroperasi menembus batas wilayah (bahkan ruang dan waktu) dan menerapkan metode pembelajaran non-konvensional, yakni dengan meninggalkan metode pembelajaran tatap muka di kampus, atau paling tidak mengurangi metoda konvensional dengan memperkenalkan metoda non-konvensional berbasis proyek. Hal tersebut berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui format baru yang lebih efisien dalam proses pembelajaran dalam arti daya jangkau yang lebih luas dan tidak terikat dengan waktu. Kegiatan non-konvensional tersebut di antaranya adalah pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) dan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) yang saat ini sudah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan MBKM dimungkinkan semua institusi pendidikan dan organisasi bisnis menjadi pemain utama dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi pendidikan tinggi, maka bisa dimaknai bahwa disiplin ekonomi dan manajemen menjadi warna dasar kompetensi inti yang dituangkan dalam kandungan materi pembelajaran (*content*) dan sistem pembelajaran (*process*). Dalam kaitan dengan masa depan ekonomi nasional, regional maupun internasional yang sudah atau sedang menuju *system market economy*, perilaku kompetitif (*competitive behavior*) akan menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan bagi para lulusan, baik sebagai *entrepreneur* atau *employee private enterprise*. Karena itu, sesuai dengan karakteristik sistem ekonomi pasar, profil lulusan haruslah merepresentasikan kompetensi yang kompetitif dan adaptif (*Adaptive and Competitive Competency-ACC*).

Kompetensi tersebut dibangun melalui pembentukan nilai kompetensi generik (pendukung) dalam penguasaan bahasa Inggris dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kompetensi khusus (utama) yang didefinisikan sesuai dengan karakteristik bidang studi dan tuntutan profesi masing-masing. Profil tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah (*added value*) yang memberikan daya saing (*competitive*



advantage) yang memadai bagi relevansi pendidikan yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.

Mengacu pada informasi yang diperoleh mengenai implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar dari narasumber yang berasal dari unsur pimpinan institusi tersebut di atas, maka bisa dimaknai bahwa penjaminan mutu institusi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan institusi secara berkelanjutan. Program penjaminan mutu institusi pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rang-kaiian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*).

Dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar, fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik harus ditekankan terutama dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Hal ini juga menyiratkan bagaimana seharusnya institusi memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya; termasuk didalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya institusi untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh pendidikan di institusi, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta *stakeholders*.

Kebijakan SPMI-PT merupakan dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di era merdeka belajar; terutama dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dalam dokumen mutu terdapat penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Kebijakan SPMI-PT dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen tertulis Kebijakan Mutu bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang penjaminan mutu secara ringkas padat namun utuh dan menyeluruh, menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir, serta membuktikan bahwa SPMI-PT yang bersangkutan terdokumentasikan.

Dokumen tertulis Manual SPMI berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan berbagai unit perguruan tinggi, serta dosen dan tenaga kependidikan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. Manual mutu juga merupakan petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita perguruan tinggi yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

PENUTUP

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar sangat bervariasi antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, pihak Dirjen Dikti sendiri



memang tidak mengharuskan adanya kesatuan mekanisme. Perbedaan konsep penjaminan mutu di era merdeka belajar sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kepekaan perguruan tinggi terhadap kebutuhan pasar dan masyarakat pada umumnya, serta tujuan dan fungsi penjaminan mutu yang dijalankan. Keragaman implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar merupakan kondisi yang sangat wajar sebab ada perguruan tinggi yang masih memusatkan diri dalam pembenahan fisik, ada pula yang sudah mengembangkan diri pada tahapan aktualisasi diri dengan lebih melebarkan program unggulan. Keragaman pelaksanaan penjaminan mutu di PTS lebih menampakkan variasi, sebab di samping keragaman kondisi mutu yang sangat tinggi, kesadaran terhadap mutu dari masing-masing pimpinan juga berbeda-beda.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar pada perguruan tinggi swasta khususnya yang berkaitan dengan rekognisi pengalaman belajar mahasiswa sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh unsur, mulai dari pimpinan, dosen dan pegawai, termasuk Tim yang terlibat dalam organisasi SPMI. Kemandirian PTS ikut mempengaruhi implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar. Kondisi internal lembaga pendidikan tinggi swasta yang beragam tanggapannya atas keberadaan penjaminan mutu inilah yang menyebabkan model penjaminan mutu juga berlainan. Di samping itu, karena model merdeka belajar banyak jenisnya dengan sendirinya perguruan tinggi bisa memilih mana yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Otonomi perguruan tinggi swasta juga berpengaruh terhadap implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar.

Berdasarkan keragaman pemahaman terhadap penjaminan mutu, rancangan dan mekanisme serta pengendaliannya, terdapat beberapa kemungkinan implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar sebagai berikut. Tersamar, yaitu memandang penjaminan mutu sebatas label untuk memberikan penamaan terhadap sebuah prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik; Radikal, yaitu memosisikan penjaminan mutu sebagai hal yang diterapkan di tempat lain sebagai cerminan dari pendekatan baru untuk menyelenggarakan, dan memelihara standar; dan Pengembangan, yaitu mendudukan penjaminan mutu sebagai prosedur yang ketat untuk diikuti dan dijadikan kebiasaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Akhirnya; direkomendasikan kepada berbagai pihak antara lain bagi Perguruan Tinggi Swasta, agar menggunakan pendekatan sistem sebagai landasan berpikir, cara mengelola, dan cara menganalisis kehidupan lembaga secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Mochtar. (2012). *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Banks, Jerry. (2001). *Principles of Quality Control*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Karpagam and Suganthy. (2016). *A Strategic Framework for Managing Higher Education Institutions*, *Advanced in Management* 3 (10)15-2.
- Mulyasa, E. (2015). *Revolusi Mental dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. (2016). *Improved Quality Management Based Learning for Preparing The Character of Graduates in Response to Globalization Era*. Dhaka, Bangladesh: *International Journal of Education and Research*; Vol.4 No. 11.



- Mulyasa, H. E. (2017). *Developing Religious Culture In School. International Journal of Scientific and Technology Research*. ISSN: 2277-8616. Vol. 6 ISSUE 07. July 2017.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. (1988). "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality", dalam *Journal of Retailing* Volume 64 Number 1 Spring 1988, pp.12-40.
- Sallis, Edward. (2002). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Ltd.
- Sharan B. and Mirriam. (2017). *Qualitative Research; A Guide to Design and Implementation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Stufflebeam, D.L. dan Shinkfield, A.J. (2005). *Systematic Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Spencer, Barbara A. (2014). *Model of Organization and Total Quality Management: Acomparation and Critical Evaluation*. "The Academy of Management Review". Vol 19 (3) July, p419-829.
- Umaedi, Husain. (2015). *Peran Baru Administrasi Pendidikan dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Februari 2011, Jilid 8, Nomor 1.
- Undang Undang (2012). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wahono, Francis. (2016). *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.